

STUDI EKSPLANATIF KETIDAKPATUHAN TALIBAN TERHADAP PERJANJIAN DOHA (2021)

NOVIANA SARI

Univrsitas Abdurrah
Novianasari@student.univrab.ac.id

Abstrak

Setelah 18 tahun Amerika Serikat di Afghanistan melakukan operasi militer pada tahun 2018 Amerika Serikat dan Taliban melakukan negosiasi di Doha, Qatar. Diawali pada 2017 Taliban mengirim surat terbuka untuk Amerika Serikat supaya menarik pasukannya dari Afghanistan agar tercipta Afghanistan yang damai. Penarikan pasukan oleh Amerika Serikat pada akhirnya dilakukan melalui proses negosiasi, namun setelah tercapainya kesepakatan dalam perjanjian Doha pada tahun 2020 (Amerika Serikat dan Taliban) Taliban tidak mematuhi poin-poin dalam perjanjian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Taliban sebuah kelompok mampu mengontrol negosiasi dengan pihak yang kuat yaitu Amerika Serikat dan berujung pada ketidakpatuhan, adanya penahanan *power* dari pihak Amerika Serikat menjadi salah satu faktor pendorong Taliban tidak mematuhi perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis eksplanatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Innen Politik dan teori kepatuhan. Perjanjian Doha dinilai tidak bertujuan untuk mencapai perdamaian di Afghanistan melainkan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dengan aman. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa poin isi perjanjian Doha, Amerika Serikat dirasa lebih lunak kepada Taliban dengan melihat fakta bahwa Taliban sebagai pihak yang mengawali negosiasi. Adanya keputusan kongres pada 2018, membuat Amerika Serikat harus menahan kekuasaannya sehingga menjadikan Taliban bisa mengontrol tuntutan dimeja perundingan yang mendorong Taliban tidak mengimplementasikan isi poin perjanjian Doha dengan benar setelah kesepakatan tercapai pada 29 Februari 2020.

Kata kunci: Perjanjian Doha, Amerika Serikat, Taliban, Politik Domestik, Ketidakpatuhan

PENDAHULUAN

Pasca tragedi pemboman *World Trade Centre* (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, Afghanistan menjadi pusat perhatian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait keamanan nasional. Dimana pada peristiwa tersebut mengakibatkan runtuhnya gedung *World Trade Centre* (WTC) dan gedung Pentagon di Amerika Serikat (BBC News, 2021). Hal ini kemudian mendorong George W. Bush mengeluarkan kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) atau dikenal sebagai Kontraterorisme. Kebijakan ini menjadi sebuah legalitas yang mendorong Amerika Serikat dalam menginisiasi gerakan melawan terorisme secara global namun kebijakan ini khususnya diawali pada Afghanistan, hal ini menjadikan terrorism sebagai isu atau berita utama yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Sasaran utama kebijakan ini adalah organisai militan islam *Al Qaeda Associated Movement* (AQAM) yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang beroperasi di Afghanistan. Al Qaeda diduga melakukan aksi tersebut sebagai bentuk balas dendam atas intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di perang Teluk untuk mendukung Israel (Azmi & Aulia, 2019, pp. 282–283). Namun Al Qaeda dilindungi oleh kelompok militan terbesar di Afghanistan yaitu Taliban, Mullah Mohammed Omar selaku pimpinan Taliban menyembunyikan keberadaan Osama bin Laden ini menjadikan Taliban masuk sebagai salah satu kelompok yang harus diberantas oleh Amerika Serikat. Penolakan oleh Taliban, mendorong

Amerika Serikat dibawah pimpinan Bush mengeluarkan wacana “*either you are with us, or you are with the terrorist*” (Council on Foreign Relation, 2022). Penolakan dari Taliban menjadi perwakilan dari Afghanistan untuk Amerika Serikat karna Taliban adalah rezim dengan menguasai 90 persen wilayah Afghanistan.

Dalam menjalankan kebijakan GWOT Amerika Serikat mendapat dukungan dan mobilisasi dari *North Athlantic Treaty Organization* (NATO) dalam operasi militer yang dilaksanakan di Afghanistan sebagai bentuk dari memberikan jaminan keamanan bagi anggota NATO. Dalam aksi melawan terrorisme NATO secara aktif mengerahkan semua kekuatan militernya untuk melakukan serangkaian operasi militer di Afghanistan dengan menggunakan teknologi yang canggih (Sinapa, 2012, pp. 66–67).

Operasi tempur pertama dimulai pada 7 Oktober 2001 dengan diluncurkannya *Operation Enduring Freedom* (OEF) melalui serangan udara. Operasi ini bertujuan untuk membantu pasukan Afghanistan yang menentang Taliban (yang dikenal sebagai *Northern Alliance*, pasukan anti-taliban etnis Pashtun). Dalam operasi ini Amerika Serikat mengerahkan sekitar 1.300 Marinir untuk menekan Taliban di provinsi selatan Kandahar. Hasil dari operasi ini adalah Taliban kehilangan kota Mazar e Sharif pada 9 November 2001. Rezim Taliban resmi berakhir pada 9 Desember 2001, ketika pemimpin Taliban Mullah Omardan para pemimpin lainnya melarikan diri dari Kandahar (Thomas, 2019a, p. 4). Amerika Serikat kemudian mengendalikan wilayah Kandahar dan beberapa wilayah lainnya seperti Taloqan, Bamiyan, Herat, Kabul dan Jalalabad.

Selanjutnya, pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan melakukan "Operasi *Anaconda*" di Provinsi Paktia pada Maret 2002. Operasi ini merupakan serangan darat terstruktur dan terbesar yang juga melibatkan sejumlah ANDFS (*Afghanistan National Defense and Security Forces*). Jumlah pasukan pada operasi tersebut terdiri 2000 tentara Amerika Serikat dan 1000 tentara Afghanistan bertempur melawan 1000 kelompok militan yaitu Taliban dan Al-Qaeda. Pada tanggal 1 Mei 2003, pejabat Amerika Serikat mengumumkan diakhirinya "pertempuran besar".

Pada Desember 2004 Hamid Kharzai menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Operasi OEF ini berlangsung dari tahun 2001 hingga 2009 (akhir pemerintahan George W. Bush). Pemerintah Afghanistan dibawah kepemimpinan Kharzai dan dukungan penuh Amerika Serikat saling bekerjasama untuk memerangi Taliban dan para pemberontak lainnya di Afghanistan.

Operasi militer berlanjut pada masa Barack Obama yaitu *Surge and Drawdown* (2009 hingga 2014). Obama memandang misi di Afghanistan bersifat prioritas sehingga setelah administrasi melakukan tinjauan strategis selama 60 hari memutuskan untuk menambah sekitar 30.000 personel ke Afghanistan, akibat lonjakan ini jumlah pasukan militer Amerika Serikat mencapai 100.000 personel dengan Sebagian besar diarahkan ke bagian selatan (Kandahar) untuk membersihkan sisa-sisa pejuang Taliban. Pada 2011 Osama bin Laden (pemimpin Al Qaeda) tewas melalui operasi ini. Pada akhir 2011 hingga 2014 Amerika Serikat mulai mengurangi pasukan dari Afghanistan secara berkala karena adanya tekanan publik di beberapa negara Eropa untuk mengurangi atau mengakhiri

kehadiran di Afghanistan. Ketika pasukan internasional berkurang pada 2014, para pejabat Afghanistan dan internasional menyatakan ketidakpastian rencana masa depan di Afghanistan. Pada tahun 2015, operasi militer Amerika Serikat menerapkan Strategi RSM (*Resolute Support Mission*) yaitu berupa misi latihan, pemberian nasihat dan bantuan tidak tempur meskipun operasi tempur oleh pasukan Amerika Serikat untuk mendukung Afghanistan terus berlanjut. Strategi ini terus berlanjut hingga masa kepresidenan Donald Trump.

Pada 15 Agustus 2017 Taliban mengirim surat terbuka pada Amerika Serikat. Dalam surat ini, Taliban mendesak Presiden Trump menarik mundur secara total pasukan Amerika Serikat dan koalisinya sehingga perang di Afghanistan bisa diakhiri (BBC, 2017). Permintaan Taliban secara tidak langsung ditolak oleh Amerika Serikat melalui pidato nasional yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2017 di pangkalan Myer-Henderson Hall, Virginia yang menyatakan *“the consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. 9/11, the worst terrorist attack in our history, was planned and directed from Afghanistan because that country was ruled by a government that gave comfort and shelter to terrorists. A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and al Qaeda, would instantly fill, just as happened before September 11th. I concluded that the security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense. Today, 20 U.S.-designated foreign terrorist organizations are active in Afghanistan and Pakistan — the highest concentration in any region anywhere in the world”* (CNN, 2017). Dengan memperkirakan konsekuensi yang harus dihadapi setelah melakukan penarikan pasukan dari Afghanistan, Trump memutuskan untuk mengenalkan *New Strategy* pada tahun 2017. Donald Trump

berpendapat bahwa tidak akan ada spesifikasi terkait strateginya di Afghanistan namun Trump meyakini bahwa di periodenya pasukan Amerika Serikat akan mempunyai otoritas *independent* yang lebih luas, hal ini ditandai dengan operasi- operasi militer yang menargetkan wilayah selatan Afghanistan yang jika dipandang secara luas sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi Taliban yaitu penanaman, produksi dan perdagangan narkotika (Thomas, 2019b, p. 9).

Akan tetapi Amerika Serikat menyadari kondisi dilapangan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui *New Strategy*, pejabat Amerika Serikat menilai konflik di Afghanistan mengalami kebuntuan yang juga tertahan oleh undang-undang kongres yang menyatakan melarang pendaan selain untuk operasi militer dan inteligen di Afghanistan. Sehingga pada Oktober 2018 menjadi awal negosiasi langsung antara Amerika Serikat dan Taliban di Qatar, menyusul gencatan senjata antara pemerintah Afghanistan dan Taliban selama liburan Idul Fitri pada tahun tersebut. Negosiasi ini tidak termasuk pemerintah Afghanistan, yang oleh Taliban disebut sebagai “boneka” dari Amerika Serikat, meskipun pembicaraan damai intra-Afghanistan (antara Taliban dan pemerintah Afghanistan) tetap menjadi tujuan Amerika Serikat yang ditegaskan. Pada Januari 2019, kedua belah pihak telah menyetujui kerangka kerja kesepakatan bahwa kedua belah pihak terutama merundingkan empat isu: jaminan kontraterorisme, penarikan pasukan, dialog intra-Afghanistan dan gencatan senjata secara komprehensif (Ban et al., 2020, p. 530).

Namun pada 7 September 2019 Trump membatalkan pembicaraan lebih lanjut terkait kesepakatan damai yang semula akan diadakan pada 8 September

2019, karna adanya penyerangan dikabul pada 6 September yang menyebabkan anggota militer Amerika Serikat tewas (Washington Post, 2021). Menurut Trump Taliban tidak menunjukkan kesungguhan dalam melakukan negosiasi. Hal ini disampaikan oleh Trump melalui cuitannya di Twitter *“unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and separately, the president of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to*

An attack in Kabul that Killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? they didn't, they

only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don't have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?” (Forces Net, 2019). Taliban tidak merasa bersalah atas serangan tersebut, karna bagi mereka pihak Amerika Serikat telah banyak membunuh Taliban, dengan ini pada 18 September 2019 Taliban menyatakan masih membuka pintu negosiasi, sehingga berharap pihak Amerika Serikat juga memikirkan kembali terkait negosiasi tersebut (BBC News, 2019).

Pada November 2019 negosiasi kembali dilakukan dengan syarat pihak Amerika Serikat mengeluarkan jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat dan Koalisi dari Afghanistan secara jelas dan pihak Taliban akan mengurangi

kekerasan meskipun menolak untuk gencatan senjata (Ban et al., 2020, p. 531). Pada 29 Februari 2020 Perjanjian Doha (kesepakatan damai Amerika Serikat-Taliban) dimana ini menandai berakhirnya invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan tercapai, ini adalah langkah awal negosiasi intra-Afghanistan dan penarikan pasukan asing dari Afghanistan.

Adapun poin perjanjian damai Amerika Serikat dengan Taliban tertuang secara rinci dalam dokumen perjanjian yang berjudul *Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America* yang memuat keempat poin perjanjian yang berisi:

1. Jaminan dan mekanisme penegakkan yang akan mencegah penggunaan tanah Afghanistan oleh kelompok atau individu mana pun terhadap keamanan Amerika Serikat dan sekutunya.
2. Jaminan, mekanisme penegakkan, dan pengumuman batas waktu penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan.
3. Setelah pengumuman jaminan untuk penarikan penuh kekuatan asing dan batas waktu di hadapan saksi internasional, dan jaminan pengumuman di hadapan saksi internasional bahwa tanah Afghan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan negara Amerika Serikat dan sekutunya, Taliban akan memulai negosiasi intra-Afghanistan dengan pihak Afghan pada 10 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 15 1441 pada kalender Lunar Hijriah dan tanggal 20 Hoot 1398 pada kalender Solar Hijriah.
4. Gencatan senjata permanen dan komprehensif akan menjadi salah satu agenda dialog dan negosiasi intra-Afghanistan. Para peserta negosiasi

intra-Afghanistan akan membahas tanggal dan modalitas gencatan senjata permanen dan komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama yang akan diumumkan bersamaan dengan penyelesaian dan kesepakatan atas peta jalan politik Afghanistan di masa depan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, Amerika Serikat dan sekutu mulai menarik pasukannya dari Afghanistan secara berkala. Namun dalam pelaksanaan poin tiga yaitu melakukan negosiasi intra-Afghanistan sulit terlaksana dikarenakan terhambat terkait pembebasan tahanan. Pemerintah Afghanistan merasa Amerika Serikat tidak berhak memasukkan poin terkait pembebasan tahanan, karena tahanan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Afghanistan. Hambatan lainnya yang sulit diatasi yaitu perbedaan kepentingan terkait bentuk pemerintahan Afghanistan di masa depan dimana pemerintah Afghanistan ingin pemerintahan berbentuk demokrasi sedangkan Taliban ingin pemerintahan yang berbentuk syariah islam. Dalam kebuntuan ini Taliban dan pemerintah Afghanistan (Bersama dengan pasukan Amerika Serikat yang belum dipulangkan) Kembali melakukan kontak senjata. Puncak dari serangan ini pada bulan Agustus 2021 saat seluruh pasukan asing sudah meninggalkan Afghanistan, Taliban menguasai Kabul ibu kota Afghanistan (semula kekuasaan pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat). Taliban bahkan mengumumkan bahwa mereka mulai memberlakukan hukum syariah dan mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan pada September 2021. Kemudian dalam susunan pemerintahan sementara Afghanistan, Taliban mengikutkan tokoh yang dianggap mengancam keamanan bagi Amerika Serikat.

Melihat ini melanggar poin 1 dan 4, poin 1 yaitu dimana Taliban menjamin akan mencegah tanah Afghanistan digunakan oleh kelompok atau individu yang mengancam keamanan Amerika Serikat. Poin 4 dalam perjanjian, Taliban telah merebut kekuasaan dengan paksa tanpa melalui hasil negosiasi intra-Afghanistan. Kedua hal ini bertentangan dengan isi perjanjian Doha yang telah disepakati pada Februari 2020.

STUDI LITERATUR

Kajian terdahulu merupakan sebuah karya ilmiah yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Kajian terdahulu mencakup kesamaan objek dengan perspektif yang berbeda. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk dijadikan bahan perbandingan karena memiliki kesamaan fokus sehingga dapat membantu keberlangsungan penelitian.

Penelitian pertama jurnal yang berjudul *Understanding the Complexities of the Afghan Peace Process* oleh Vinay Kaura (2018). Menggunakan analisis studi eksplanatif dalam menjelaskan penelitian ini. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa proses pembicaraan damai antara Taliban dan pemerintahan Afghanistan sulit tercapai karena Taliban berusaha untuk menang dan mendominasi pembicaraan bahkan sebelum adanya persetujuan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Atas rasionalitas Amerika Serikat sepertinya mereka akan tetap melakukan pembicaraan damai dengan Taliban untuk mencapai kondisi yang tidak merugikan bagi pihak Amerika Serikat. Jika strategi Taliban untuk berbicara dengan Amerika Serikat (sebelum memasuki negosiasi damai) diterima maka status quo Taliban di Afghanistan akan tetap bertahan. Hal ini akan menyulitkan pemerintahan Afghanistan untuk menerapkan demokratis. Tawaran dialog tanpa syarat oleh Asraf Ghani kepada Taliban telah menerima dukungan dari semua pemangku kepentingan, namun Taliban belum menanggapi terkait prospek pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Taliban justru mendesak untuk pembicaraan

tatap muka dengan Amerika Serikat. Kemampuan pemerintahan Ghani untuk menjaga kekompakan, memerikan layanan utama, dan memberikan keamanan kepada rakyat Afghanistan dapat melemahkan gelombang Taliban. Tetapi solusi militer tampaknya paling tidak mungkin untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Jumlah sumber daya internasional yang tidak proporsional yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk perekonomian Afghanistan nyatanya kalah jumlah dengan peluru yang digunakan untuk membujuk Taliban meletakkan senjata mereka. Konflik di Afghanistan bersifat multidimensi yang melibatkan aktor internal Afghanistan, regional dan global karena kompleksitas yang melekat, tidak ada aktor tunggal yang memegang kunci untuk menyelesaikan konflik tersebut, oleh karena itu setiap proses perdamaian di Afghanistan akan sulit tercapai, memakan waktu serta akan ada banyak ruang skeptisisme bahwa prosesnya akan rapuh. Faktanya bahwa tidak ada pihak yang akan memenangkan konflik ini proses perdamaian menjadi satu-satunya alternatif yang dinilai efektif.

Penelitian Kedua jurnal yang berjudul *Rasionalitas Amerika Serikat Dalam Perjanjian Damai Dengan Taliban Pasca Konflik di Afghanistan* oleh Ni Wayan Ayu Suwari, Sukma Sushanti, dan A.A. Ayu Intan Parameswari (2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep *Rational Actor Model* dan *Retrenchment Strategy*. Perbincangan terkait perdamaian dimulai sejak tahun 2018 tahun dimana Donald Trump menjadi presiden, Trump memiliki retorika “*make America great again*” Trump mengutamakan kepentingan nasional dan keamanan masyarakat Amerika Serikat diatas negara lain sehingga kebijakan luar negeri terkait Afghanistan juga dipengaruhi oleh pertimbangan domestik.

Pemikiran rasional jika perjanjian damai di Afghanistan tercapai maka Amerika Serikat juga akan menghentikan anggaran terkait pengeluaran invasi dimana anggaran ini memakan banyak biaya, waktu dan pengarahan pasukan yang tidak sedikit. Adapun *trade off* yang dikorbankan Amerika Serikat adalah memikirkan ulang terkait kepentingan eksplorasi cadangan alam dan juga kepentingan terkait pendistribusian minyak ke Tiongkok dan Rusia namun dengan ini Amerika Serikat lebih memilih menghentikan kepentingan jangka panjang ketimbang kepentingannya jangka pendek.

Penelitian ketiga jurnal dengan judul *The US State-Building Failure in Afghanistan* oleh Osman Mohammed Afzal (2021). Menggunakan metode kualitatif dan studi eksplanatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegagalan Amerika Serikat di Afghanistan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu ketidakmampuan pemerintah Afghanistan untuk berdamai membangun stabilitas Afghanistan (metode), fundamentalisme keagamaan dan korupsi. Adapun kegagalan lainnya disebabkan dari pemulihan dan penguatan sistem politik pusat Afghanistan dimana pengambilan keputusan adalah otoritas individu. Sistem terpusat dengan masyarakat multikultural seperti Afghanistan harus diimbangi dengan memiliki kebijakan yang kuat untuk menghancurkan fundamentalisme agama dan Taliban di Afghanistan. Namun kebijakan nasional pemerintah Afghanistan atas Taliban secara krusial telah memberi Taliban ruang untuk mengintegrasikan kepentingan mereka. Sedangkan pertempuran melawan Taliban tidak didasarkan pada komitmen inklusif oleh pemerintah. Kegagalan pembangunan ini bersifat multidimensi yang ditandai dengan meluasnya korupsi secara institusional, kurangnya transparansi mengenai bantuan asing dan pengabaian institusi radikal

oleh pemerintah. Dengan demikian Afghanistan merupakan negara yang rapuh. Sejak tahun 2001 pemerintah Afghanistan telah menciptakan kapasitas minimum di negara tersebut hal ini ditandai dengan pendapatan domestik yang belum mampu mengimbangi pengeluaran lembaganya. kesepakatan damai Taliban dan Amerika Serikat memperumit situasi di Afghanistan

Penelitian keempat jurnal dengan judul *Penarikan Tentara Amerika Serikat dari Afghanistan* karya Yesi Riana Yusnita Sari (2021). Menggunakan konsep *The Clash of Civilization* Samuel Huntington. Pada karya ini membahas bahwa setelah hampir 20 tahun invasi di Afghanistan presiden Joe Biden melanjutkan rencana dari presiden Donald Trump yaitu untuk penarikan tentara Amerika dari Afghanistan. Salah satunya dengan melakukan diskusi dengan Taliban di Doha, Qatar untuk mencapai kesepakatan demi merealisasikan tujuan pemulangan tersebut. Namun dengan realisasi pemulangan tentara Amerika Serikat dari Afghanistan bukanlah solusi yang baik bagi pemerintah Afghanistan. Karena di sisi lain, pihak Amerika Serikat hanya perlu memastikan bahwa Taliban harus memenuhi janji untuk memberikan dan menjamin hak-hak wanita. Arab Saudi dan Qatar bisa dijadikan contoh bagi Taliban dalam mengelola Afghanistan dan bahwasannya hukum syariah tetap dapat dijalankan namun pada saat yang bersamaan bisa memberika hak-hak pendidikan dan pekerjaan pada wanita. Organisasi internasional juga siap mengambil peran untuk membantu wanita di Afghanistan supaya mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan serta hak-hak asasi lainnya.

Penelitian kelima jurnal dengan judul *Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian Dengan Taliban Dan Penarikan Pasukan*

Amerika Serikat Dari Afghanistan Di Masa Kepemimpinan Donald Trump oleh Safina Putri Purba, Reni Windiani, Satwika Paramasatya (2022). Menggunakan teori realisme neoklasik perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban resmi dicapai pada 29 Februari 2020 setelah berbulan-bulan diadakan negosiasi di Qatar dan ini menandai berakhirnya kehadiran Amerika Serikat di Afghanistan. dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri Donald Trump di pengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal yaitu adanya pengaruh dari sistem internasional atau struktur yang berlaku. Amerika Serikat perlu mempertahankan status hegemoninya dalam sistem internasional. Hubungan yang tidak harmonis antara NATO dengan Amerika Serikat memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump menyampaikan kritik mengenai keraguan komitmen Amerika Serikat terhadap NATO terkait pengeluaran biaya militer Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat hanya akan membela sekutu jika mereka meningkatkan pengeluaran biaya militer mereka, Trump juga menyampaikan bahwa NATO gagal memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB yang telah ditetapkan selama KTT NATO di Wales pada tahun 2014 silam. Kontribusi NATO di Afghanistan juga dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik. Strategi RSM (*Resolute Support Mission*) yakni misi non-tempur dan jumlah pasukan internasional ditempatkan di Afghanistan jauh lebih rendah dari tahun 2014 silam, sementara Taliban dengan pengaruhnya yang besar semakin mendominasi Afghanistan. Namun bagi banyak negara anggota, konflik tersebut disebut sebagai perang Amerika yang terpencil, sementara mereka menghadapi tantangan penting terorisme dan migrasi yang

tidak terkendali yang berasal dari sekitar wilayah yang berdekatan dengan Afrika dan timur tengah. Adapun faktor domestik yang memengaruhi kebijakan Donald Trump yaitu terkait prinsip *America First* dimana penekanan terhadap nasionalisme dan patriotisme Amerika Serikat serta mengutamakan Amerika Serikat diatas kepentingan negara lain. Melihat bagaimana NATO tidak banyak memberi pengaruh dalam konflik di Afghanistan, Amerika Serikat mencari cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus berlama-lama di Afghanistan dari adanya pandangan ini maka menarik pasukan dari Afghanistan dan melakukan perjanjian damai dengan Taliban adalah salah satu solusi permasalahan menyelesaikan konflik di Afghanistan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab terkait permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen (wahidmurni, 2017, p. 1). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Obyek alamiah yang dimaksud sugiyono (2013) adalah obyek yang benar adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Adapun hal ini dilakukan untuk menjelaskan secara teratur fenomena yang akan diteliti oleh penulis.

PEMBAHASAN

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik berbentuk federasi yang terdiri dari 50 negara bagian. Dalam menentukan arah Politik Luar Negeri, pada dasarnya Amerika Serikat dilandasi oleh persepsi pentingnya membina

hubungan dengan negara lain demi mendapat mencapai tujuan dan manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu dalam prinsip politik luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh pragmatism, pasalnya hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu yang berasal dari berbagai bangsa sehingga Amerika Serikat menjunjung tinggi ideologi liberlisme.

Kemudian dalam dalam proses dan pembuatan kebijakan luar negeri akan melibatkan beberapa lembaga seperti eksekutif (presiden), legislatif (kongres) dan yudikatif serta melibatkan departemen pendukung fokus kebijakan yang lebih kompleks seperti Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Departemen Pertahanan, *National Security Agency*, *National Security Council*, *Central Intelligence Agency*.

Adapun tugas dan fungsi yang dilakukan oleh aktor pembuat kebijakan Amerika Serikat yaitu pertama, Lembaga eksekutif (presiden) merupakan pangliman tertinggi militer Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan informasi intelijen asing. Melalui konstitusi presiden menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, dan kepala diplomat. Dengan ini

presiden bertanggung jawab atas pertahanan militer dan kepentingan nasional negara. Kedua, Lembaga yudikatif (kongres) dalam perumusan kebijakan luar negeri kongres Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang secara jelas ditujukan untuk membatasi presiden dalam menjalankan dan membuat kebijakan luar negeri. Secara garis besar peranan kongres Amerika Serikat adalah menerima, menolak, atau mengubah kebijakan luar negeri yang disulkan oleh presiden dan secara teknis kongres merupakan pos terakhir dari proses pembuatan dan penyusunan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian untuk departemen pendukung fokus kebijakan yang lebih kompleks seperti Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Departemen Pertahanan, *National Security Agency*, *National Security Council*, *Central Intelligence Agency*, dan kelompok kepentingan bertugas untuk mengumpulkan informasi yang akan dilaporkan kepada Lembaga eksekutif ataupun legislatif

Sehingga dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh kondisi dan interaksi domestik politik yang saling berhubungan dan ketergantungan antara satu sama lain.

4.1.1 Peran Kelompok Kepentingan

Berdirinya SIGAR (*Special Inspector General of Afghanistan Reconstruction*) pada tahun 2008 dibawah wewenang Pasal 1229 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran melalui arahan kongres. Lembaga ini didirikan untuk memberikan pengawasan yang independen dan obyektif terhadap proyek dan kegiatan rekonstruksi Afghanistan. kegiatan SIGAR yaitu melakukan audit dan investigasi untuk: 1) mendorong efisiensi dan

efektivitas program rekonstruksi dan 2) mendeteksi dan mencegah pemborosan, penipuan, dan pelecehan (terkait HAM).

Adapun Audit ini ditujukan untuk berbagai program dan kegiatan untuk memenuhi mandat legislatif, dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan upaya rekonstruksi Amerika Serikat, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan investigasi pidana dan perdata yang berkaitan dengan program dan operasi yang didukung dengan dolar rekonstruksi Amerika Serikat. Hal Ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan melalui penuntutan pidana, tindakan perdata, penyitaan, pemulihan moneter, serta penangguhan dan pencekalan (SIGAR, 2023). Kemudian Sigar akan memberikan laporan pengawasan setiap tiga bulan sekali secara rutin. Laporan-laporan dari SIGAR yang berisi informasi kondisi lapangan Afghanistan sangat penting bagi kongres untuk dijadikan acuan kebijakan terkait rekonstruksi di Afghanistan.

a) Akumulasi Dana

Menurut Laporan SIGAR pada Januari 2018 Amerika Serikat telah mengalokasikan sekitar \$122,09 miliar untuk bantuan dan rekonstruksi di Afghanistan sejak TA 2002. Total ini telah dialokasikan sebagai berikut: \$74,83 miliar untuk keamanan (\$4,44 miliar untuk inisiatif kontra-narkotika), \$32,99 miliar untuk tata kelola dan pembangunan (\$4,25 miliar untuk inisiatif kontranarkotika), \$3,39 miliar untuk bantuan kemanusiaan, \$10,88 miliar untuk operasi sipil (SIGAR, 2018b, p. 63). Adapun berikut gambar lebih jelas terkait perincian dana yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk Afghanistan:

JUMLAH KUMULATIF YANG DISESUAIKAN, DIWAJIBKAN, DAN DICAIRKAN				
TA 2002–2017 (\$ MILIAR)				
	Ditetapkan	Wajib	Dicairkan	Tersisa
Dana Pasukan Keamanan Afghanistan (ASFF)	\$69,56	\$65,48	\$64,60	\$2,47
Tanggap Darurat Komandan Program (CERP)	3.69	2.28	2.28	0,00
Dana Infrastruktur Afghanistan (AIF)	0,99	0,77	0,70	0,07
Satuan Tugas untuk Bisnis & Stabilitas Operasi (TFBSO)	0,82	0,75	0,65	0,11
DOD Kegiatan Penanggulangan Narkoba dan Pemberantasan Narkoba (DOD CN)	3.13	3.13	3.13	0,00
Dana Dukungan Ekonomi (ESF)	19.88	18.46	15.69	3.42
Pengendalian Narkotika Internasional & Penegakan Hukum (INCLE)	5.06	4.78	4.10	0,83
Total Dana Utama	\$103,14	\$95,66	\$91,15	\$6,89
Dana Rekonstruksi Lainnya	8.06			
Operasi Sipil	10.88			
Total	\$122,09			

Gambar 4. 1 Rincian Distribusi Dana untuk Afghanistan
 Sumber : (SIGAR, 2018b, p. 63)

Dana ini akan digunakan untuk melatih, memperlengkapi, dan mempertahankan pasukan keamanan Afghanistan dan pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur berskala besar yang sedang berjalan, seperti yang didanai oleh AIF (*Afghanistan Infrastructure Fund*) dan ESF (*Economic Support Fund*), memerangi produksi dan peredaran narkotika, dan memajukan supremasi hukum, memperkuat sektor peradilan, dan memajukan hak asasi manusia (SIGAR, 2018b, p. 66).

Pendanaan diharapkan menghasilkan peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi pasukan keamanan Afghanistan (ANDSF) seperti sejauh mana ANDSF telah meningkatkan tekanan pada organisasi militan dan teroris dengan merebut kembali dan mempertahankan wilayah dan mengganggu serangan dan apakah pemerintah Afghanistan memastikan bahwa pasokan, peralatan, dan

persenjataan yang disediakan Amerika Serikat didistribusikan dengan tepat ke ANDSF. Jika hasil penilaian tidak menguntungkan, Mattis (Sekretaris SIGAR) dapat memutuskan, setelah memberi tahu Kongres, untuk menahan bantuan keuangan kepada ANDSF. Sehingga peran dan keberadaan SIGAR sangat penting bagi kongres Amerika Serikat dalam merumuskan kebijakan luar negeri untuk Afghanistan.

a) Kondisi Pemerintah Afghanistan

Efektivitas pemerintah Afghanistan akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong stabilitas ini adalah salah satu tujuan dari distribusi dana oleh Amerika Serikat. Namun Menurut penilaian, sebagian besar asumsi kritis yang mendukung strategi sebagian atau seluruhnya tidak valid. Sebagai contoh, ekonomi Afghanistan menunjukkan pertumbuhan yang lambat, dan para pengamat mengatakan hanya ada sedikit bukti bahwa pemerintah Afghanistan telah meningkatkan pengeluaran pembangunan secara besar-besaran untuk rekonstruksi di Afghanistan (USAID, 2016, pp. 15–16).

Strategi pembangunan berkelanjutan yang dipimpin oleh Afghanistan (percaya bahwa tujuan ini sebagian besar bersifat aspiratif), para pengamat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai validitas tujuan yang mendasari perluasan pertanian berkelanjutan yang dipimpin pertumbuhan ekonomi, memelihara dan meningkatkan kesehatan, pendidikan dan perolehan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kinerja dan legitimasi pemerintah Afghanistan. keseimbangan antara pengucuran dan oleh Amerika Serikat dengan implementasi dana tidak sama.

Amerika Serikat telah mengalokasikan \$8,7 miliar untuk upaya kontranarkotika sejak tahun 2002, tetapi lebih banyak tanah Afghanistan yang dibudidayakan opium-poppy pada tahun 2017 daripada sebelumnya. Menurut Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB, tingkat budidaya meningkat 63 persen dari tahun sebelumnya menjadi 328.000 hektar. Tingkat potensi produksi opium meningkat 87 persen menjadi 9.000 ton dari tahun 2016. Tingkat pemberantasan juga meningkat dari hasil tahun sebelumnya, tetapi 750 hektar yang diberantas hampir tidak sebanding dengan angka budidaya (SIGAR, 2018b, p. 60).

Selain itu, pasukan keamanan Afghanistan juga tidak menunjukkan hasil yang pasti untuk Taliban, tidak ada penurunan kekerasan atau adanya kondisi kemunduran dari Taliban di Afghanistan. Taliban tetap melakukan penyerangan dan perebutan beberapa wilayah kekuasaan pemerintah Afghanistan, dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan strategi RSM berupa pemberian nasihat dan pelatihan belum membuahkan hasil seperti yang ditujukan. Ini menandakan bahwa korupsi masih merajalela dan institusi pemerintah Afghanistan masih lemah.

Menurut laporan Inspektur jenderal khusus Amerika Serikat untuk rekonstruksi Afghanistan, John Sopko, yang ditugasi melacak miliaran dolar bantuan Amerika, memperkirakan bahwa sementara Amerika Serikat membayar gaji untuk 320.000 tentara dan polisi Afghanistan di seluruh negeri, jumlah pasukan sebenarnya hanya 120.000. Sisanya disebut "tentara hantu". Para komandan yang korup mengklaim gaji dan tunjangan untuk tentara dan polisi yang tidak ada (The Seattle Times, 2016).

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam laporan Sigar, per April 2018 ada 23.212 personel yang “tidak sah” atau tidak terhitung yang tercatat dalam Sistem Penggajian Elektronik berbasis web UNDP yang saat ini digunakan untuk membayar polisi. Dari jumlah itu, 18.622 orang berstatus patroli dan 4.590 orang petugas. Persentase tertinggi catatan personel polisi yang tidak valid terjadi di provinsi berikut: Helmand (51 persen), Uruzgan (47 persen), Farah (47 persen), Nuristan (44 persen), dan Paktika (41 persen) (SIGAR, 2018c, p. 90).

Korupsi yang terus berlanjut di dalam pasukan keamanan Afghanistan berkontribusi pada kegagalan misi dan menimbulkan risiko bagi misi di Afghanistan seperti Hubungan antara tantangan korupsi yang meluas dan berkelanjutan dengan tindakan pejabat pemerintah Afghanistan dan jaringan patronase yang sudah lama diterima secara budaya. Perilaku korupsi yang paling umum yaitu terkait bahan bakar, makanan, tentara yang tidak ada “hantu”, pemerasan, narkoba, penambangan ilegal, penyuapan, pencurian, atau penjualan ilegal properti pemerintah Afghanistan.

Amerika Serikat telah melakukan upaya-upaya untuk menghentikan korupsi di Afghanistan, yaitu Presiden Trump menandatangani Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 2018 menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan yang menerapkan rekomendasi SIGAR. Salah satu ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa dalam 180 hari, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan USAID (*United States Agency for International Development*) mengembangkan strategi bersama antarlembaga untuk memerangi korupsi dalam upaya rekonstruksi. Ketentuan ini merupakan modifikasi dari rekomendasi dari laporan *Lessons Learned Program* SIGAR pertama yang berfokus pada upaya antikorupsi di Afghanistan.

4.1 Analisa Kongres Pasca Laporan SIGAR 2018

Pada dasarnya sejak tahun 2010 kongres telah melakukan upaya sporadis untuk mengkondisikan, membatasi, atau mengakhiri kehadiran militer Amerika Serikat di Afghanistan dengan mulai memperkenalkan rancangan undang-undang seperti pada:

- 2010: RUU DPR menyerukan “pengakhiran yang bertanggung jawab atas perang di Afghanistan” menarik 33 *cosponsor* dan 72 *cosponsor* pada tahun 2011.
- 2011: sebuah resolusi yang mengarahkan presiden untuk memindahkan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dalam waktu 30 hari sesuai dengan resolusi kekuatan perang yang mana resolusi ini mendapat 93 suara.

- 2012 dan 2014: Amandemen Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang akan memotong pendanaan untuk operasi AS (selain penarikan pasukan AS) masing-masing menarik 113 dan 153 suara.
- 2018: H.R 1666 akan melarang pendanaan untuk kegiatan Amerika Serikat di Afghanistan (selain operasi kedutaan besar Amerika Serikat atau pengumpulan intelijen).
- 2019: melalui S.J.Res. 12, “undang-undang layanan Afghanistan” diperkenalkan pada maret
- 2019: pada bulan april diperkenalkan HR 2060, “Memastikan Undang- Undang Afghanistan yang Aman” (Thomas, 2019c, pp. 4–5).

Upaya sporadis oleh legislatif terwujud pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda pengakhiran di Afghanistan. dengan diperkenalkan nya H.R 1666 dan penggambaran oleh pejabat Amerika Serikat bahwasannya perang mengalami kebuntuan, mendorong pemerintah memberi wewenang kepada pejabat Amerika Serikat untuk mencari pembicaraan langsung dengan Taliban pada juli 2018 (Thomas, 2019c, p. 2).

Adapun kebuntuan yang digambarkan oleh pejabat Amerika Serikat terlihat setelah pada tahun 2017 presiden Donald Trump memutuskan untuk merubah posisi kebijakan di Afghanistan dengan strategi baru (*New Strategy*) untuk Afghanistan dan asia selatan. Dalam pidato Nasional Donald Trump menyampaikan bahwa strategi tersebut menampilkan garis yang lebih keras terhadap Pakistan dan peran yang lebih besar bagi india, tidak ada jadwal yang ditentukan untuk penyesuaian kebijakan ataupun penarikan personel, namun akan memperluas penargetan untuk pasukan Amerika Serikat di Afghanistan (CNN,

2017). Hal ini terlihat bahwa adanya penambahan sekitar 3.000 tentara tambahan sehingga jumlah total pasukan sekitar 14.000-15.000 di Afghanistan untuk mensukseskan strategi ini (DW News, 2017).

Kata “memperluas” dalam pidato yang disampaikan dalam pidato Trump mempunyai maksud memperluas operasi militer dengan menargetkan lahan-lahan opium dan laboratorium yang berada dibawah kendali Taliban, operasi ini dipandang sebagai salah satu bentuk usaha untuk mengurangi sumber pendapatan Taliban dimana pendapatan dari opium ini digunakan untuk menyokong aktivitas militer Taliban (Thomas, 2019b, p. 9).

Upaya untuk mengakhiri kehadiran di Afghanistan muncul kembali setelah kongres merasa skeptisisme dengan operasi militer di Afghanistan yang tidak kunjung berakhir (buntu), sementara Amerika Serikat telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Menurut laporan Sigar pada awal tahun 2018 alokasi kumulatif untuk bantuan dan rekonstruksi di Afghanistan berjumlah sekitar \$122,09 Milliar. total tersebut dibagi menjadi empat kategori utama pendanaan rekonstruksi: keamanan, tata kelola dan pembangunan, kemanusiaan, serta pengawasan dan operasi. Sekitar \$8,69 miliar dana ini ini mendukung inisiatif kontra-narkotika yang mencakup kategori keamanan (\$4,44 miliar) dan tata kelola pembangunan (\$4,25 miliar) (SIGAR, 2018b, p. 64).

Sejak pengungkapan strategi Administrasi Asia Selatan, pasukan Amerika Serikat telah meningkatkan jumlah serangan udara: Amerika Serikat merilis 378 amunisi pada Januari, 469 pada Februari, dan 339 pada Maret 2018 selama 215 misi. Total 1.186 amunisi yang dirilis pada kuartal pertama tahun 2018 merupakan rekor untuk periode ini sejak pelaporan dimulai pada tahun 2013, dan

lebih dari dua kali lipat jumlah dari kuartal pertama tahun 2017. Namun, laboratorium yang dihancurkan tidak mahal dan mudah untuk menggantikannya kembali. Sulit untuk membangkrutkan Taliban hanya dengan memusnahkan produksi opium poppy. (SIGAR, 2018a, p. 2). Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, laboratorium morfin/heroin hanya membutuhkan peralatan sederhana seperti kompor, tong besi, dan mesin pres buatan lokal sehingga strategi ini dinilai tidak memiliki efek jangka Panjang.

Setelah menjadi presiden, Trump memutuskan untuk menambah pasukan di Afghanistan dengan alasan bahwa Taliban harus ditekan untuk terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Tetapi Taliban justru terus memperluas kendali mereka atas wilayah Afghanistan. Strategi baru yang diterapkan ini tidak berlangsung sesuai dengan tujuan, menurut laporan SIGAR pada tahun 2018 Taliban tidak mengalami penurunan pada aktivitas militer yang ditandai dengan tidak adanya penurunan pada wilayah Afghanistan yang berada dibawah kendali Taliban sejak 2017 hingga pertengahan 2018 (SIGAR, 2018c, p. 68).

Kondisi tidak sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat, dengan tidak adanya penurunan maka menunjukkan bahwa Taliban masih aktif dalam kegiatan-kegiatan militer di Afghanistan. Menurut laporan SIGAR dibawah ini, penambahan pasukan oleh Amerika Serikat tidak menahan atau menurunkan kehadiran Taliban di Afghanistan.

Kenaikan 1 persen pada tahun 2018 menunjukkan bahwa strategi baru Amerika Serikat tidak terlalu berdampak pada aktivitas militer Taliban. Sebaliknya strategi baru Amerika Serikat mendapat kecaman dari berbagai pihak seperti warga Afghanistan, kelompok Hak Asasi Manusia dan juga pejabat pemerintah karna serangan-serangan udara secara tidak sengaja membunuh warga sipil dan pasukan keamanan Afghanistan (SIGAR, 2018a, p. 3).

Hasil dari analisa Kongres atas kondisi lapangan di Afghanistan melalui laporan SIGAR memulai upaya sporadis terkait pembatasan kegiatan di Afghanistan muncul. Sehingga pada Maret 2018 kongres mengeluarkan RUU No.1666 yang akan melarang pendanaan untuk kegiatan Amerika Serikat di Afghanistan (selain operasi kedutaan besar Amerika Serikat atau pengumpulan intelijen). Ini menandakan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan kegiatan

militer di Afghanistan. Penghentian dana ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan Taliban.

Penghentian kehadiran militer Amerika Serikat di Afghanistan pada dasarnya sejalan dengan kampanye Donald Trump pada tahun 2016 yaitu mengakhiri “perang selamanya” sehingga pada September 2018 Donald Trump menunjuk Zalmay Khalilzad mantan Duta besar Amerika Serikat untuk Afghanistan sebagai perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan (Brooking, 2022, p. 14). Pada akhirnya Pembicaraan terkait perdamaian dengan Taliban dimulai sejak oktober 2018 di Qatar.

4.1.1 RUU Kongres Pendukung Negosiasi

Penempatan pasukan militer Amerika Serikat yang dikerahkan ke Afghanistan di bawah Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer 2001 (AUMF, PL 107-40) yang berisikan izin penggunaan angkatan bersenjata Amerika Serikat, peraturan ini menyatakan pertama bahwa presiden berwenang untuk menggunakan semua kekuatan yang diperlukan terhadap negara, organisasi, atau orang yang ditentukan merencanakan, mengizinkan, melakukan, atau membantu melindungi organisasi tersebut untuk mencegah tindakan terorisme internasional dimasa depan terhadap Amerika Serikat oleh negara, organisasi atau orang tersebut. Kedua kekuasaan perang harus sesuai dengan otorisasi hukum terkait peraturan resolusi kekuatan perang yang telah disahkan sebelumnya (Authorization, 2001). Peraturan ini disahkan oleh kongres pada 18 september 2001 dalam kongres 107 tepat satu minggu setelah peristiwa terror di Amerika Serikat terjadi.

Pada 22 maret 2018, kongres memperkenalkan undang-undang baru dalam

H.R 1666 kongres 115 yang berisi “Melarang Ketersediaan Dana untuk Kegiatan Republik Islam Afghanistan dan untuk Tujuan Lain – akan melarang

pendanaan untuk kegiatan AS di Afghanistan (selain operasi Kedutaan Besar AS atau pengumpulan intelijen) satu tahun setelah diundangkan, kecuali jika Presiden menyerahkan sertifikasi keamanan nasional pengabaian dan Kongres, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pengabaian itu, memberlakukan resolusi bersama yang mengizinkan penggunaan dana untuk tujuan yang dijelaskan dalam sertifikasi (berdasarkan prosedur yang dipercepat)” (Thomas, 2019c, p. 16).

Menurut beberapa laporan dari akhir 2018 dan awal 2019 mengindikasikan bahwa Presiden Trump mungkin sedang mempertimbangkan untuk memerintahkan penarikan beberapa pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan sesuai dengan tuntutan Taliban di meja perundingan. Pada Februari 2019 sebagai reaksi atas laporan bahwa pemerintahan Trump telah memutuskan bahwa akan mencabut AUMF 2001 tanpa penggantian (Thomas, 2019c, p. 5). Hal ini menandakan bahwa Amerika Serikat benar-benar menyelesaikan aktivitas militernya dari Afghanistan.

Dan hal ini terwujud melalui kongres ke-116, S.J.Res. 12, “undang-undang layanan Afghanistan” diperkenalkan pada maret 2019. Adapun isi dari “undang-undang layanan Afghanistan” yaitu mengharuskan Menteri pertahanan untuk merumuskan dalam waktu 45 hari sejak berlakunya, sebuah penarikan militer dari Afghanistan, mengharuskan pemindahan semua Angkatan bersenjata Amerika Serikat dari Afghanistan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya, memberikan penghargaan kepada semua personel militer yang dikerahkan untuk mendukung “perang global melawan teror” dengan bonus sebesar \$2.500 (Thomas, 2019c, p. 15).

Disusul satu bulan setelahnya pada April 2019, HR 2060, "Memastikan Undang-Undang Afghanistan yang Aman," telah mempertimbangkan penarikan militer di Afghanistan yang mencakup peringatan terhadap "penarikan mendadak" pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan (dan Suriah). Diperkenalkan di antara ketentuan lainnya, melarang penggunaan dana untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika Serikat di bawah 10.000 kecuali Direktur Intelijen Nasional menyatakan kepada Kongres bahwa berbagai persyaratan telah dipenuhi, termasuk penolakan Taliban terhadap Al Qaeda dan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan (Thomas, 2019c, p. 10).

Diperkenalkannya undang-undang baru oleh kongres terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisi dari Afghanistan menandakan perbincangan di meja negosiasi berjalan cukup lancar meskipun terkadang tidak mencapai hasil yang ditujukan dengan maksimal.

4.1 Stimulus ketidakpatuhan Taliban dalam implementasi perjanjian

Salah satu tujuan disahkannya perjanjian Doha antara Amerika Serikat dan Taliban pada 2020 adalah untuk mencapai perdamaian di Afghanistan. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak diharuskan saling mematuhi dan mengimplementasikan perjanjian supaya tujuan dari pelaksanaan negosiasi terwujud. Menurut teori kepatuhan Milgram, kepatuhan seorang aktor dipengaruhi oleh sumber kontrol dibawah paksaan atau bersifat pengawasan langsung. Kepatuhan diperlukan untuk membuktikan bahwa seorang aktor konsisten dalam menerapkan norma-norma atau peraturan yang sudah ditetapkan. Namun menurut Abram dan Antonio Chayes ketidakpatuhan kerap terjadi dalam suatu pengimplementasian peraturan yang berasal dari ambiguitas dan ketidakpastian

bahasa perjanjian serta keterbatasan kapasitas para pihak untuk melaksanakan perjanjian mereka.

Adanya perjanjian Doha menurunkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh Amerika Serikat dan Taliban. Dengan terpenuhinya kewajiban maka masing-masing pihak akan saling menghormati yang mendorong terwujudnya perdamaian di Afghanistan. Kewajiban dari pihak Amerika Serikat menurut poin perjanjian yaitu penarikan penuh pasukan beserta koalisinya dari Afghanistan, sedangkan pihak Taliban harus memenuhi kewajiban bahwa tanah Afghanistan tidak akan menjadi tempat berlindung bagi teroris dan akan melakukan negosiasi intra-Afghanistan untuk merundingkan masa depan politik Afghanistan dengan pemerintah Afghanistan.

Pada salah satu poin perjanjian dinyatakan bahwa untuk memetakan masa depan politik domestik Afghanistan dilakukan melalui negosiasi intra-Afghanistan antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Poin tersebut merupakan poin 4 perjanjian Doha yang berbunyi “Gencatan senjata permanen dan komprehensif akan menjadi salah satu agenda dialog dan negosiasi intra-Afghanistan. Para peserta negosiasi intra-Afghanistan akan membahas tanggal dan modalitas gencatan senjata permanen dan komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama yang akan diumumkan bersamaan dengan penyelesaian dan kesepakatan atas peta jalan politik Afghanistan dimasa depan”. Namun pada September 2021 Taliban mengumumkan pembentukan pemerintah sementara Afghanistan tanpa melalui negosiasi. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Taliban menunjukkan bahwa Taliban inkonsisten dan tidak memenuhi kewajibannya. Sementara pihak Amerika Serikat secara konsisten tetap melakukan penarikan pasukannya dari Afghanistan.

Sebelum Amerika Serikat melakukan invasi kepada Afghanistan pada tahun 2001, Taliban merupakan kelompok mujahid terbesar, terkuat dan paling berpengaruh di Afghanistan. Mereka menerapkan hukum syariat Islam sesuai dengan standar mereka di wilayah kekuasaan mereka. Taliban menguasai 90 persen wilayah Afghanistan dengan menyisakan 10 persen wilayah yang dikuasai oleh kelompok mujahid lain (*Nothern Alliance*). Dengan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh Taliban pada umumnya mereka disebut sebagai rezim. Invasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui serangan udara bekerjasama dengan *Nothern Alliance* dengan hasil mundurnya Taliban dari beberapa provinsi Afghanistan, dengan ini mulai terbentuk pemerintah Afghanistan dengan bantuan penuh dari Amerika Serikat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Amerika Serikat, Taliban merupakan kelompok mujahid yang kuat.

Sejak tahun 2016 kehadiran kelompok Taliban mulai dirasakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan. Ditandai dengan jatuhnya beberapa kota besar seperti Kandahar dibawah kendali Afghanistan. Kebangkitan Taliban disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Taliban, yaitu dimana pada masa akhir jabatannya Barack Obama menetapkan strategi *Resolute Support Mission* (RSM). Strategi ini berupa operasi non-tempur seperti pelatihan dan pemberian nasihat untuk para militer pemerintah Afghanistan. Perubahan strategi ini menyebabkan puluhan ribu personel militer Amerika Serikat dan koalisinya Kembali ke negara masing-masing. Ini menandai awal kebangkitan kelompok Taliban di Afghanistan. Dengan ini jelas, supaya Taliban bisa bangkit sepenuhnya poin perjanjian terkait “penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya” menjadi momentum yang dinantikan oleh

Taliban. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan menyebabkan kondisi “tidak adanya pengawasan langsung” terhadap Taliban, yang menyebabkan adanya dorongan untuk tidak mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan.

Pada saat proses negosiasi perjanjian Doha, Amerika Serikat menguraikan bahwa dalam “memetakan masa depan politik Afghanistan” Taliban harus mendiskusikan terkait hak-hak Wanita dan anak-anak, pembagian kekuasaan, dan gencatan senjata permanen dengan pemerintah Afghanistan. Respon Taliban menanggapi hal ini yaitu “semua akan dibicarakan dalam negosiasi intra- Afghanistan”. Tanggapan ini dinilai ambigu dan memiliki unsur ketidakpastian dibanding dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya yang dipandang dijalankan secara pasti.

Dinilai ambigu dan tidak pasti setelah melihat sejarah Panjang konflik terkait perebutan kekuasaan di afghanistam selama bertahun-tahun, sejak adanya invasi uni soviet tahun 1979, disusul dengan perang saudara hingga invasi Amerika Serikat yang berakhir pada 2021 menyebabkan defisit kepercayaan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Sehingga ungkapan Taliban “semua akan didiskusikan dalam negosiasi intra-Afghanistan” dianggap tidak pasti dalam pengimplementasian poin perjanjian Doha.

Kondisi “tidak adanya pengawasan langsung” karna penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya dari Afghanistan (sesuai isi poin perjanjian) dan “ambiguitas dan ketidakpastian bahasa perjanjian” dalam proses persetujuan negosiasi “semua akan didiskusikan dalam intra-Afghanistan” mendorong Taliban

memilih untuk tidak mengimplementasikan poin perjanjian. Taliban menganggap bahwa mereka tidak terikat dengan *power* yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh dalam pengimplementasian perjanjian dimasa depan, menurut beberapa pakar politik internasional ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Taliban sudah mulai terlihat sejak proses negosiasi berlangsung. Taliban mengetahui bahwa tidak akan ada yang bisa menahan mereka untuk mengimplementasikan perjanjian karena dari pihak Amerika Serikat juga tertahan oleh keputusan kongres yang mengharuskan untuk penghentian dana kepada Afghanistan kecuali untuk kegiatan kedutaan dan pengumpulan intelijen. Sehingga ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Taliban merupakan langkah yang sudah diprediksikan oleh beberapa pakar politik internasional.

KESIMPULAN

Demi mencapai perdamaian di Afghanistan Amerika Serikat pada akhirnya bersedia melakukan negosiasi dengan Taliban, dengan dalih “pengakhiran yang bertanggung jawab di Afghanistan”. Taliban menjadi aktor yang mewakili kelompok lain di Afghanistan karna Taliban diyakini memiliki sumber ekonomi dan militer yang sangat berpengaruh di tanah Afghanistan.

Namun setelah perjanjian damai tercapai Februari 2020, hal ini bukanlah negosiasi untuk mencapai perdamaian di Afghanistan melainkan negosiasi tentang penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya dengan aman dari Afghanistan. Adanya keputusan kongres pada Maret 2018 terkait pelarangan penggunaan dana di Afghanistan menjadikan peluang bagi Taliban untuk mengendalikan proses negosiasi. Dimulai dengan adanya surat terbuka untuk Amerika Serikat untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada 15 Agustus 2017, yang disambut dengan pidato nasional Donald Trump terkait perubahan strategi untuk Afghanistan dan Asia Selatan bahwa pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan akan memiliki otoritas *independent* yang lebih luas (adanya penambahan pasukan dan tambahan dana). Namun strategi ini tidak membuahkan hasil, dilihat dalam laporan Sigar pada awal 2018 Taliban tetap mampu mempertahankan beberapa wilayah di Afghanistan tanpa ada penurunan. Pejabat Amerika Serikat menilai bahwa konflik ini mengalami kebuntuan karna sudah berlangsung hampir dua dekade.

Kongres Amerika Serikat mengeluarkan RUU No 1666 akan melarang pendanaan untuk kegiatan Amerika Serikat di Afghanistan (selain operasi kedutaan besar Amerika Serikat atau pengumpulan intelijen. Keputusan ini menjadikan perjanjian Doha tidak berarti, karena adanya penahanan *power* Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Taliban. Ini menjadikan Amerika Serikat melunak pada Taliban ketika melakukan negosiasi. Sehingga menjadi salah satu pemicu ketidakpatuhan Taliban dalam pengimplementasian perjanjian.

Amerika Serikat tidak bisa menekan Taliban untuk memutuskan hubungan dengan kelompok pemberontak lain di Afghanistan melainkan hanya sejauh kelompok tersebut tidak membahayakan Amerika Serikat dan koalisinya. Taliban juga bersikeras akan mendiskusikan gencatan senjata dengan pemerintah Afghanistan dalam negosiasi intra-Afghanistan sehingga pada poin perjanjian hanya tertulis gencatan senjata antara Taliban dengan Amerika Serikat dan koalisinya. Hal ini menjadi salah satu pendorong kemenangan Taliban atas pemerintah Afghanistan dan berakhir pembentukan pemerintahan sementara pada September 2021 oleh Taliban. Tidak ada kejelasan pelaksanaan perjanjian bagi Taliban karena adanya "semua akan didiskusikan selama negosiasi intra- Afghanistan". Melihat ini, perjanjian Doha dinilai tidak membawa perdamaian bagi masyarakat Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

- AlJazeera. (2021). *Taliban announces new government in Afghanistan*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/7/taliban-announce-acting-ministers-of-new-government>
- Authorization, P. S. (2001). United States (U.S.): Public Law 107-40 (Joint Resolution to Authorize the Use of United States Armed Forces Against Those Responsible for the Recent Attacks Launched Against the United States). *International Legal Materials*, 40(5), 1282–1282. <https://doi.org/10.1017/s002078290002088x>
- Azmi, N. A., & Aulia, A. W. (2019). Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) di Era Donald Trump. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 281–294.
- Ban, A. M., Implementation, C., Unit, S., Release, P., Korea, N., Korea, S., Convention, O., & Release, P. (2020). United States Signs Agreement with the Taliban, but Prospects for Its Full Implementation Remain Uncertain. *American Journal of International Law*, 114(3), 529–538. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.45>
- BBC. (2017). *Taliban kirim surat terbuka ke Presiden Donald Trump, apa isinya?* BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40940261>
- BBC News. (2019). *Taliban “buka pintu” perdamaian dengan AS, setelah Trump nyatakan perundingan sudah “mati.”* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49723697>
- BBC News. (2021). *Serangan 11 September: Apa yang terjadi hari itu dan setelahnya?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58084150>
- Brooking, B. S. (2022). *Why Was a Negotiated Peace Always* (Vol. 184, Issue

184).

Cfr. (2022). *Instability in Afghanistan | Global Conflict Tracker*. Global Conflict Tracker. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan>

CNN. (2017). *President Trump's full address on Afghanistan*. https://www.youtube.com/watch?v=jf_Z0NOab8&t=293s%0A

CNN. (2020). *AS dan Taliban menandatangani perjanjian bersejarah*. CNN. <https://edition.cnn.com/2020/02/29/politics/us-taliban-deal-signing/index.html>

CNN Indonesia. (2021). *Jejak Kilat Taliban Kembali Kuasai Afghanistan dalam 3 Bulan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210817123551-113-681435/jejak-kilat-taliban-kembali-kuasai-afghanistan-dalam-3-bulan>

Council on Foreign Relation. (2022). *The U.S. War in Afghanistan 1999 – 2021*. <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>

Darna, N., Herlina, E., Tetap, D., Studi, P., Fakultas, M., Universitas, E., & Ciamis, G. (2018). *Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen*. 5(April), 287–292.

DW News. (2017). *Presiden Trump Kirim Pasukan Tambahan ke Afghanistan – DW – 22.08.2017*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/presiden-trump-kirim-pasukan-tambahan-ke-afghanistan/a-40187432>

DW News. (2021). *who are the leaders of Afghanistan's new government*. <https://www.youtube.com/watch?v=BMjBxZjQS8o>

Fearon, J. D. (1998). Domestic politics, foreign policy, and theories of international relations. *Annual Review of Political Science*, 1, 289–313. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.289>

Forces Net. (2019). *Trump Calls Off Peace Talks With Taliban After Kabul Bombing*. Forces Net. <https://www.forces.net/news/afghanistan/trump-calls-peace-talks->

taliban-after-kabul-bombing

- Hartono, B. (2005). *Power Politics : Hard Power , Tangible & Intangible*. 48(2), 1–5.
- Iryana, R. K. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1), 1–17.
- Kaposi, D. (2017). The resistance experiments: Morality, authority and obedience in Stanley Milgram's account. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 47(4), 382–401. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12137>
- Kompas.com. (2021). *Kenapa Batas Biden Menarik Pasukan dari Afghanistan 31 Agustus? Bagaimana jika Telat? Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/27/173218070/kenapa-batas-biden-menarik-pasukan-dari-afghanistan-31-agustus-bagaimana?page=all>
- Maxmanroe.com. (2021). *Perjanjian Internasional: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Tahapannya*. Maxmanroe.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/perjanjian-internasional.html>
- Milner, H. v, & Tingley, D. (2016). Sailing the water's edge: the domestic politics of American foreign policy. In *Choice Reviews Online* (Vol. 53, Issue 11). <https://doi.org/10.5860/choice.194941>
- Nasution, S. (2017). *Variabel penelitian*. 1–9.
- NBC News. (2022). *Biden Announces Death Of Al Qaeda Leader Ayman al-Zawahri*. <https://www.youtube.com/watch?v=ZQuOfeMteQo>
- Reliefweb. (2022). *Global Terrosrisme Index 2022*. OCHA Services. <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022>
- republika.co.id. (2021). *AS Bekukan Dana Bank Sentral Afghanistan*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qy1ev9382/as-bekukan-dana-bank-sentral-afghanistan>
- Security Council. (2020). Letter dated 19 May 2020 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of the Security Council. *United*

Nation Security Council, 1988(May).

SIGAR. (2018a). ADDENDUM TO SIGAR'S APRIL 2018 QUARTERLY REPORT TO THE UNITED STATES CONGRESS. In *SPECIAL INSPECTOR GENERAL*.

SIGAR. (2018b). Quarterly Report to the United States congress. In *SPECIALINSPECTOR GENERAL*.

SIGAR. (2018c). Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Quarterly Report to the U.S. Congress. *SPECIAL INSPECTOR GENERAL*, July, 273.
<https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr.pdf>
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/Addendum_2018-01-30qr.pdf

SIGAR. (2023). *About SIGAR*. Special Inspector General for Afghanistan. <https://www.sigar.mil/about/index.aspx?SSR=1>

Sinapa, Y. M. (2012). Keterlibatan NATO Dalam Operasi Militer yang Dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush. *Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–84.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24200>

SOUTHFRONT. (2019). *Military Situation In Afghanistan On April 18, 2019 (Map Update)South Front*. South Front.
<https://southfront.org/military-situation-in-afghanistan-on-april-18-2019-map-update/>

SOUTHFRONT. (2021). *Military Situation In Afghanistan On August 24, 2021 (Map Update)South Front*. SOUTH FRONT.
<https://southfront.org/military-situation-in-afghanistan-on-august-24-2021-map-update/>

Thomas, C. (2019a). Afghanistan: Background and U . S . Policy. *Congresional Research Service*, 1–58.
<https://crsreports.congress.gov>

Thomas, C. (2019b). Afghanistan: Background and U . S . Policy.

Congressional Research Service, 1–58.

Thomas, C. (2019c). Afghanistan: Issues for congress and legislation 2017-2019.

Congressional Research Service, 1–31.

- Thomas, C. (2021). Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress. *Congressional Research Service Journal*, 1–41. <https://crsreports.congress.gov>
- Triesthi, H. (2018). Politik Domestik Rusia Sebagai Pendorong Kebijakan Pivot ke Asia (2012-2016). *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3), 186–201.
- UNAMA. (2021). Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Update: 1 January to 30 June 2021. In *The Pulse of Humanitarian Assistance* (Issue June). <https://doi.org/10.2307/j.ctt13x07g6.7>
- United State Embassy. (2020). *Agreement For Bringing Peace to Afghanistan Between the Islamic Emirate of Afghanistan*. <https://qa.usembassy.gov/agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/>
- USAID. (2016). The USAID / Afghanistan Plan for Transition. *The American People*.
- Voaindonesia.com. (2021). *Tiga Lagi Ibukota Provinsi di Afghanistan Jatuh ke Tangan Taliban*. Voa Indonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/tiga-lagi-ibukota-provinsi-di-afghanistan-jatuh-ke-tangan-taliban/5998587.html>
- wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian kualitatif*. 1–17.
- Washington Post, T. (2021). *Trump's deal with the Taliban, explained*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/20/trump-peace-deal-taliban/>
- Yale, L. J., Gerard, C., Latrobe, B., Law, I., Schell, O. H., Wolfe, D., Ackerman, B., Balsam, P., Brennan, G., David, P., Feldman, N., Hood, R., Hurrell, A., Janis, M., Kahn, P., Kingsbury, B., Kronman, T., Lester, K., Lustgarten, L.,

... Wendt, A. (1997). *Review Essay: Why Do Nations Obey International Law?*